

RENCANA KERJA

2020



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	38
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	51
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	60
BAB V PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD dan Capaian Renstra s/d Tahun 2018	6
2.2	Program dan Kegiatan BPKAD Tahun Anggaran 2018	30
2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun Anggaran 2018	37
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	40
3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2017-2022	55
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	61

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang – undang tersebut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang di dalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan program dan kegiatan untuk periode satu tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu – isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan.

Renja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2020 sebagai dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Tahun 2017-2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja BPKAD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
- b. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
- r. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan;
- s. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya;
- t. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
- u. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- w. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja BPKAD Tahun 2020 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1. Maksud
 - a. Menyelaraskan Tujuan dan Sasaran BPKAD dengan program dan kegiatan serta penganggaran Tahun 2020;
 - b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2019.
- 2. Tujuan
 - a. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra-BPKAD) Tahun 2017-2022 ke dalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) Tahun 2020;
 - b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD Tahun Anggaran 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 6 ayat (2) huruf e telah ditetapkan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi BPKAD diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya. Secara umum, tugas BPKAD adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dan menyelenggarakan pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka BPKAD melaksanakan pelayanan dibidang pengelolaan keuangan dan aset meliputi pelayanan dalam rangka proses penganggaran daerah, pelayanan dalam rangka proses pencairan dana belanja langsung maupun belanja tidak langsung, pelayanan dalam pengelolaan barang milik daerah, serta pelayanan dalam penyusunan pelaporan keuangan daerah bagi seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD dan capaian renstra sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja BPKAD dan Capaian Renstra s/d Tahun 2018
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Tasikmalaya

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BPKAD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja BPKAD Tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BPKAD s/d Tahun 2019	
						Target Renja BPKAD Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja BPKAD Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	T U J U A N Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	91		82	83,43	101,74	85	85	100
	S A S A R A N Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	91		82	83,43	101,74	85	85	100
06.44.	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	91		82	83,43	101,74	85	85	100

06.44. 336	Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	SPM/ SOP	80		20	20	100	20	20	100
06.44. 06	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey	Dok	4		1	1	100	1	1	100
	T Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
	S Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100		100	100	100	100	100	100
		Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100		100	100	100	100	100	100

		Persentase implementasi teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
		Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	100		100	100	100	100	100	100
06.15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
		Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	%	100		100	100	100	100	100	100

		Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	%	100		100	100	100	100	100	100
		Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	%	100		100	100	100	100	100	100
06.15.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Ranperda APBD	4		1	1	100	1	1	100
06.15.02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Ranperwal Penjabaran APBD	4		1	1	100	1	1	100

06.15.03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Ranperda Perubahan APBD	4		1	1	100	1	1	100
06.15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD	4		1	1	100	1	1	100
06.15.05	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD	Ranperwal Pedoman Penyusunan APBD	4		1	1	100	1	1	100
06.15.06	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	Ranperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	4		1	1	100	1	1	100

06.15.07	Verifikasi Dokumen Anggaran	Jumlah dokumen anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya	RKA/ RKPA	4000		1000	1000	100	3097	3097	100
06.15.08	Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi target anggaran pendapatan daerah	Dok	16		4	4	100	4	4	100
06.15.09	Pengelolaan Data Anggaran	Jumlah dokumen data anggaran	Dok	4					1	1	100
06.15.10	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	Dok	4		1	1	100	1	1	100
06.15.11	Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan bantuan keuangan provinsi	Dok	4		1	1	100	1	1	100

06.15. 12	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen SPD yang disyaratkan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah dan dokumen SP2D yang menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah	SPD dan SP2D	40.000 dan 60.000		25000	25000	100	1400 dan 16.000	1400 dan 16.000	100
06.15. 13	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan daerah	Orang	41 dan 14		55	55	100	41	41	100
06.15. 14	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah dokumen kendali pelaksanaan realisasi APBD	Dok	16		4	4	100	4	4	100

06.15.15	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rekapitulasi transaksi harian dari BUD	Dok	16		4	4	100	4	4	100
06.15.16	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah leger gaji pegawai pada sistem penggajian	Dus / Kali	408 /68		102	102	100	102	102	100
06.15.17	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT pelaporan pajak orang pribadi	SPT	30.000		7500	7500	100	7.500	7.500	100
06.15.18	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Jumlah dokumen laporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji	Dok	4		1	1	100	1	1	100
06.15.19	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen laporan pemberian hibah dan bantuan sosial	Dok	16		4	4	100	4	4	100
06.15.20	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen laporan bantuan keuangan partai politik	Dok	4		1	1	100	1	1	100

06.15. 21	Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah dokumen laporan realisasi dana transfer	Dok	16		1	1	100	4	4	100
06.15. 22	Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	Jumlah dokumen laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS	Dok	8		2	2	100	2	2	100
06.15. 23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4		1	1	100	1	1	100
06.15. 24	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Ranperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4		1	1	100	1	1	100

06.15. 25	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal	Ranperwal Tentang Saldo Awal	4					1	1	100
06.15. 26	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya	Dok	8		2	2	100	4	4	100
06.15. 28	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD	Dok	8		1	1	100	1	1	100
06.15. 29	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jasa konsultasi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Paket	4		1	1	100	1	1	100

06.15. 30	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah PPK Perangkat Daerah, PPKD, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan yang menjadi peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual	Orang	92		92	92	100	92	92	100
--------------	---	--	-------	----	--	----	----	-----	----	----	-----

06.15. 31	Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Ranperwal Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	4					2	2	100
06.15. 32	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Jumlah sidang pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Kali	24		6	6	100	6	6	100
06.18	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	%	100		100	100	100	100	100	100

			Persentase inventarisasi aset milik daerah	%	100		100	100	100	100	100	
			Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat	%	44		36	31,66%	100	44	44	100
06.18.01	Pembuatan Tanah Pemerintah Tasikmalaya (Protasik)	Profil Milik Kota	Jumlah paket profil tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya berbasis teknologi informasi	Paket	4					1	1	100

06.18.02	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah	Dok	12		3	3	100	3	3	100
06.18.03	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang yang menjadi peserta pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah	Orang	110		110	110	100	110	110	100

06.18.04	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah	Dok	8		2	2	100	2	2	100
06.18.05	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Jumlah dokumen pencatatan aset / barang milik daerah	Dok KIB (A, B, C, D, E dan F)	6		6	6	100	6	6	100
06.18.06	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	Sertifikat	120		30	30	100	30	30	100
06.18.07	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	Dok	4		1	1	100	1	1	100
06.18.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah papan nama aset milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	Papan Nama Aset	204		51	51	100	52	52	100
	S Meningkatnya A akuntabilitas keuangan S dan kinerja perangkat R daerah A N	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82		75	73,64	98,19	82	82	100

		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	4		2	2	100	4	4	100
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100		100	100	100	100	100	100
06.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	%	100		100	100	100	100	100	100
06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Buah	3200		800	800	100	520	520	100
		Jumlah buku cek	Buku	48		12	12	100	12	12	100
06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet	Bulan	48		12	12	100	12	12	100

06.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan / bangunan kantor yang diasuransikan	Unit	9		9	9	100	24	24	100
06.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	Unit	31		23	23	100	31	31	100
06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan	Bulan	12		12	12	100	12	12	100
06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Jenis	80		20	20	100	2244	2244	100
06.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan	Jenis	52		13	13	100	8.627	8.627	100
		Jumlah penggandaan	Lembar	85.100		21.275	21.275	100	17.020	17.020	100
		Jumlah penjilidan	Buku	440		110	110	100	55	55	100

06.01. 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Buah	52		13	13	100	405	405	100
06.01. 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Buah	68		17	17	100	996	996	100
06.01. 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	Unit	68		17	17	100	488	488	100
06.01. 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Eksemplar	1.440		360	360	100	360	360	100
		Jumlah iklan media massa	Kali	40		10	10	100	10	10	100
06.01. 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu	Dus	14.000		3.556	3.556	100	3960	3960	100
		Jumlah makan dan minum harian	Jenis	56		14	14	100	14	14	100

06.01. 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kali	520		12	12	100	130	130	100
06.01. 21	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Orang	48		12	12	100	4	4	100
06.01. 22	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai	Paket	80		20	20	100	20	20	100
06.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	%	100		100	100	100	100	100	100
		Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100		100	100	100	100	100	100

06.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan mobil jabatan	Unit	1					1	1	100
06.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	10					9	9	100
06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Unit	4		1	1	100	1	1	100
06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Unit	4					2	2	100
06.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor	Unit	12		3	3	100	16	16	100
06.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Paket	4		1	1	100	4	4	100
06.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan	Kali	6		6	6	100	14	14	100
06.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	Kali	13		13	13	100	21	21	100

06.02. 26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Kali	12		3	3	100	44	44	100
06.02. 29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala meubelair	Kali	20					5	5	100
06.02. 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kali	120		40	40	100	172	172	100
06.02. 45	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah jasa prasarana aparatur	Paket	8		1	1	100	2	2	100
06.02. 48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	60		26	26	100	24	24	100
06.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	%	100		100	100	100	100	100	100

06.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Potong	556		139	100	100	150	150	100
06.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	%	100		-	-		100	100	100
06.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	Orang	40		-	-		10	10	100
06.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (Point)	82		75	73,64	98,19	82	82	100
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100		100	100	100	100	100	100
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	4		2	2	100	3	3	100

06.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dok	4		1	1	100	1	1	100
06.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	Dok	8		2	2	100	2	2	100
06.06.03	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	Dok	8		2	2	100	2	2	100
06.06.04	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	Dok	4		1	1	100	1	1	100
06.13.	Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	%	100		100	100	100	100	100	100

		Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD	%	100		100	100	100	100	100	100
06.13.01	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	Dok	4		1	1	100	1	1	100
06.13.02	Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun	Dok	1		1	1	100			
06.13.03	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun	Dok	1							
06.13.04	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan triwulanan	Dok	16		4	4	100	4	4	100

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 melalui anggaran murni dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.013.202.267 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp. 18.305.469.354 atau 91,47% terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 9.427.108.967 dan realisasi sebesar Rp. 9.440.277.943 atau 100,14%.
2. Belanja Langsung dilaksanakan melalui 11 program dan 74 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.586.093.300 dan realisasi sebesar Rp. 8.865.191.411 atau 83,74%.

Rincian program dan kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Kegiatan BPKAD
Tahun Anggaran 2018

NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		FISIK
			Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6
BELANJA TIDAK LANGSUNG		9.427.108.967	9.440.277.943	100,14	100,00
Belanja Pegawai		9.427.108.967	9.440.277.943	100,14	100,00
BELANJA LANGSUNG		10.586.093.300	8.865.191.411	83,74	83,74
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.214.844.000	1.486.611.816	67,12	86,27
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	867.000.000	422.342.496	48,71	80,00
	3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	70.000.000	45.567.836	65,10	100,00
	4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	115.550.000	8.505.300	7,36	60,00
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	215.268.000	201.229.978	93,48	100,00
	6 Penyediaan Alat Tulis Kantor	88.228.000	63.155.400	71,58	85,00
	7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000	65.316.680	76,84	85,00

	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.995.200	99,95	100,00
	9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.000.000	73.522.900	95,48	95,00
	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.600.000	41.208.200	94,51	100,00
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	13.860.000	57,75	90,00
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman	99.548.000	78.465.200	78,82	85,00
	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	373.000.000	321.597.125	86,22	90,00
	14	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	136.800.000	133.645.501	97,69	100,00
	15	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	6.250.000	4.600.000	73,60	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2.580.530.000	2.110.988.845	81,80	89,54
	1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	475.000.000	368.957.300	77,68	90,00
	2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	-	-	-
	3	Pengadaan Meubelair	105.000.000	86.784.500	82,65	100,00
	4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	480.000.000	449.907.000	93,73	100,00
	5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	188.050.000	89.685.000	47,69	80,00
	6	Pemeliharaan Rutin/Berkala	129.760.000	105.559.146	81,35	80,00

	Kendaraan Dinas/Operasional				
	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	91.720.000	36.625.205	39,93	60,00
	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeulair	20.000.000	-	-	-
	9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	13.140.000	21,90	50,00
	10 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	45.000.000	25.855.000	57,46	70,00
	11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	976.000.000	934.475.694	95,75	95,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40.400.000	28.256.250	69,94	100,00
	1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	40.400.000	28.256.250	69,94	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	-	-	-
	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	-	-	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65.000.000	61.155.800	94,09	100,00
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.749.800	98,33	100,00
	2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	15.000.000	14.891.000	99,27	100,00
	3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	15.000.000	14.891.000	99,27	100,00

	4	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran	10.000.000	8.312.000	83,12	100,00
	5	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	10.000.000	8.312.000	83,12	100,00
6	Program Perencanaan Kerja		20.000.000	19.196.400	95,98	100,00
	1	Penyusunan Rencana Kerja	10.000.000	9.531.900	95,32	100,00
	2	Penyusunan Rencana Strategis	10.000.000	9.664.500	96,65	100,00
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		5.169.293.300	4.725.506.739	91,41	100,00
	1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	184.030.000	178.172.646	96,82	100,00
	2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	119.000.000	116.344.467	97,77	100,00
	3	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	195.230.000	191.378.628	98,03	100,00
	4	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	102.800.000	102.342.353	99,55	100,00
	5	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	200.000.000	197.707.041	98,85	100,00
	6	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	255.000.000	252.615.000	99,06	100,00
	7	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian SKPD	60.000.000	59.974.000	99,96	100,00

	8	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100.000.000	98.226.817	98,23	100,00
	9	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Provinsi Tahun 2018)	200.000.000	194.566.068	97,28	100,00
	10	Sensus Barang Milik Daerah	465.609.000	399.304.025	85,76	100,00
	11	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	185.500.000	184.521.823	99,47	100,00
	12	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	150.000.000	148.701.185	99,13	100,00
	13	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	170.000.000	164.466.731	96,75	100,00
	14	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	180.000.000	178.760.050	99,31	100,00
	15	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	75.010.000	74.908.080	99,86	100,00
	16	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	120.000.000	119.158.938	99,30	100,00
	17	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	362.534.000	199.333.650	54,98	100,00
	18	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	70.000.000	69.330.815	99,04	100,00
	19	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	60.000.000	59.577.950	99,30	100,00
	20	Penilaian Barang Milik Daerah	155.230.000	135.336.550	87,18	100,00
	21	Perencanaan Kebutuhan	56.831.000	55.992.559	98,52	100,00

	Barang Milik Daerah				
22	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	255.966.000	190.267.082	74,33	100,00
23	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	226.830.000	163.565.200	72,11	100,00
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	75.000.000	73.344.000	97,79	100,00
25	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.696.000	326.443.745	93,35	100,00
26	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	164.330.000	163.837.754	99,70	100,00
27	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	60.000.000	59.994.400	99,99	100,00
28	Verifikasi Dokumen Anggaran	107.019.000	106.755.410	99,75	100,00
29	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	15.000.000	14.621.750	97,48	100,00
30	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD	100.000.000	99.336.688	99,34	100,00
31	Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	102.845.000	102.716.660	99,88	100,00
32	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	45.833.300	45.807.405	99,94	100,00
33	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK SKPD dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	200.000.000	198.097.269	99,05	100,00

8	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	75.000.000	70.868.710	94,49	100,00
	1 Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	75.000.000	70.868.710	94,49	100,00
9	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	21.400.000	20.768.280	97,05	100,00
	1 Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	21.400.000	20.768.280	97,05	100,00
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
	1 Pengelolaan Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
11	Program Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah	369.626.000	331.838.571	89,78	100,00
	1 Penatausahaan Bantuan Provinsi	169.626.000	163.298.451	96,27	100,00
	2 Penatausahaan Dana Transfer	150.000.000	129.713.275	86,48	100,00
	3 Penatausahaan Dana Kapitasi JKN Dan Dana BOS	50.000.000	38.826.845	77,65	100,00
JUMLAH ANGGARAN		10.586.093.300	8.865.191.411	83,74	94,39

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya dari 3 sasaran dan 7 indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2018

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPKAD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai			82	85	89	90	83,43	85	89	90	
2	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%			100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai			75	77	79	81	73,64	77	79	81	
6	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level			2	3	3	3	2	3	3	3	
7	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%			100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKAD pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Belum terintegrasinya SIMDA Keuangan dengan SIMDA Barang;
2. Masih terdapat persyaratan administrasi pengajuan proposal hibah yang diminta tidak sesuai dengan yang diajukan oleh penerima manfaat;
3. Belum mempunyai gudang aset yang representatif;
4. SP2D Online belum dapat dilaksanakan;
5. Transaksi non tunai belum optimal;
6. Proses pengajuan sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya berjalan lambat karena kurangnya SDM/ Pegawai yang mengelola BMD berupa tanah;
7. Jangka waktu pengusulan KUA PPAS ke RAPBD tidak cukup untuk melakukan pendahuluan RKA kegiatan.

Tantangan yang harus dihadapi BPKAD pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat dan Perangkat Daerah lain sebagai penerima layanan dari BPKAD semakin kritis dan menuntut kualitas pelayanan secara prima;
2. Diperlukan penerapan teknologi informasi yang tinggi dalam mendukung pelayanan prima;
3. Tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan. Adapun peluang yang dimiliki oleh BPKAD yaitu sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan yang sangat kuat dalam upaya peningkatan pelayanan BPKAD dalam seluruh aspek pelayanan;
2. Kualitas & Kapabilitas pegawai pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan secara optimal;
3. Peran strategis BPKAD dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

1. Menambah anggaran pada kegiatan Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah agar SIMDA Keuangan dengan SIMDA Barang dapat terintegrasi;
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan penerima manfaat hibah dengan menambah anggaran pada kegiatan pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
3. Memberikan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan SP2D Online dengan menambah anggaran pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah BPKAD.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Tasikmalaya

Kode Ring	RANCANGAN AWAL RKPD				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN			
	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2019	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.04 . 4.04.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	100	1.936.403.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	100	1.936.403.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek	520 Buah dan 12 Buku	3.600.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek	520 Buah dan 12 Buku	3.600.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon,air, listrik dan jasa layanan internet	12 Bulan	744.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon,air, listrik dan jasa layanan internet	12 Bulan	744.000.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan / bangunan kantor yang diasuransikan	24 Unit	93.100.000	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan / bangunan kantor yang diasuransikan	24 Unit	93.100.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	31 Unit	25.550.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	31 Unit	25.550.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan Jumlah perlengkapan Kebersihan	12 Bulan dan 804 Buah	222.305.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan Jumlah perlengkapan Kebersihan	12 Bulan dan 804 Buah	222.305.000

4.04 . 4.04.06 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	2244 Buah	90.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	2244 Buah	90.000.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan Jumlah penjilidan	8627 Buah 17020 Lembar dan 55 Buku	85.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan Jumlah penjilidan	8627 Buah 17020 Lembar dan 55 Buku	85.000.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	405 Buah	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	405 Buah	15.000.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	996 Buah	88.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	996 Buah	88.000.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	488 Buah	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	488 Buah	15.000.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan Jumlah iklan media massa	360 Eksemplar dan 10 Kali	24.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan Jumlah iklan media massa	360 Eksemplar dan 10 Kali	24.000.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu Jumlah makan dan minum harian	3960 Dus dan 1224 Buah	118.948.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu Jumlah makan dan minum harian	3960 Dus dan 1224 Buah	118.948.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	130 Kali	251.000.000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	130 Kali	251.000.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	4 Orang	152.400.000	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	4 Orang	152.400.000
4.04 . 4.04.06 . 01 . 22	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai	20 Paket	8.500.000	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai	20 Paket	8.500.000

4.04 . 4.04.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	100	2.190.197.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	100	2.190.197.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan	1 Unit	350.000.000	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan	1 Unit	350.000.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	9 Unit	162.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional	9 Unit	162.000.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 Unit	100.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 Unit	100.000.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	2 Unit	125.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	2 Unit	125.000.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor	16 Unit	80.000.000	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor	16 Unit	80.000.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4 Paket	586.850.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	4 Paket	586.850.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan	14 Kali	151.875.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan	14 Kali	151.875.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	21 Kali	122.945.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	21 Kali	122.945.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	44 Kali	123.600.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	44 Kali	123.600.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Frekuensi pemeliharaan rutin / berkala meubelair	5 Kali	25.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Frekuensi pemeliharaan rutin / berkala meubelair	5 Kali	25.000.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah frekuensi pemeliharaan	172 Kali	80.400.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah frekuensi pemeliharaan	172 Kali	80.400.000

	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor			Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor		
4.04 . 4.04.06 . 02 . 45	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah jasa prasarana aparatur	2 Paket	45.000.000	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah jasa prasarana aparatur	2 Paket	45.000.000
4.04 . 4.04.06 . 02 . 48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	24 Unit	237.527.000	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	24 Unit	237.527.000
4.04 . 4.04.06 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	100	45.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	100	45.000.000
4.04 . 4.04.06 . 03 . 05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	150 Potong	45.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	150 Potong	45.000.000
4.04 . 4.04.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	100	20.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	100	20.000.000
4.04 . 4.04.06 . 05 . 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	10 Orang	20.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	10 Orang	20.000.000
4.04 . 4.04.06 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	77 Ktgr (Point)	65.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	77 Ktgr (Point)	65.000.000
4.04 . 4.04.06 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Dokumen	10.000.000
4.04 . 4.04.06 . 06 . 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	2 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	2 Dokumen	30.000.000

4.04 . 4.04.06 . 06 . 03	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	2 Dokumen	20.000.000
4.04 . 4.04.06 . 06 . 04	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	1 Dokumen	5.000.000	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	1 Dokumen	5.000.000
4.04 . 4.04.06 . 13	Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100	20.000.000	Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100	20.000.000
4.04 . 4.04.06 . 13 . 01	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	1 Dokumen	10.000.000
4.04 . 4.04.06 . 13 . 04	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan triwulanan	4 Dokumen	10.000.000	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan triwulanan	4 Dokumen	10.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100	3.650.000.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100	3.650.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	1 Ranperda APBD	215.840.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	1 Ranperda APBD	215.840.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2020	1 Ranperwal Penjabaran APBD	122.060.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA 2020	1 Ranperwal Penjabaran APBD	122.060.000

4.04 . 4.04.06 . 15 . 03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Ranperda Perubahan APBD	215.840.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Ranperda Perubahan APBD	215.840.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD	122.060.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	1 Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD	122.060.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 06	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Percepatan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019	1 Renperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	141.590.000	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Percepatan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019	1 Renperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	141.590.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 07	Verifikasi Dokumen Anggaran	Jumlah dokumen anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya	3097 RKA/ RKPA	93.960.000	Verifikasi Dokumen Anggaran	Jumlah dokumen anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya	3097 RKA/ RKPA	93.960.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 09	Pengelolaan Data Anggaran	Jumlah dokumen data anggaran	1 Dokumen	85.120.000	Pengelolaan Data Anggaran	Jumlah dokumen data anggaran	1 Dokumen	85.120.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 05	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020	1 Ranperwal Pedoman Penyusun APBD	100.660.000	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020	1 Ranperwal Pedoman Penyusun APBD	100.660.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 08	Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi target anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019	4 Dokumen	85.910.000	Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi target anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2019	4 Dokumen	85.910.000

4.04 . 4.04.06 . 15 . 11	Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan bantuan keuangan provinsi	1 Dokumen	116.960.000	Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan bantuan keuangan provinsi	1 Dokumen	116.960.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 12	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen SPD yang disyaratkan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah Jumlah dokumen SP2D yang menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah	1400 SPD 2	217.280.000	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen SPD yang disyaratkan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah Jumlah dokumen SP2D yang menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah	1400 SPD 2	217.280.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 13	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara pengeluaran yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan daerah Jumlah bendahara penerimaan yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan daerah	41 Orang Bendahara Pengeluaran dan 14 Orang Bendahara Penerimaan	220.000.000	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara pengeluaran yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan daerah Jumlah bendahara penerimaan yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan daerah	41 Orang Bendahara Pengeluaran dan 14 Orang Bendahara Penerimaan	220.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 14	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah dokumen kendali pelaksanaan realisasi APBD	4 Dokumen	35.000.000	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah dokumen kendali pelaksanaan realisasi APBD	4 Dokumen	35.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 15	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rekapitulasi transaksi harian dari BUD	4 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rekapitulasi transaksi harian dari BUD	4 Dokumen	30.000.000

4.04 . 4.04.06 . 15 . 16	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah leger gaji pegawai pada sistem penggajian	102 Dus	140.000.000	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah leger gaji pegawai pada sistem penggajian	102 Dus	140.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 17	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT pelaporan pajak orang pribadi	7500 SPT	42.720.000	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT pelaporan pajak orang pribadi	7500 SPT	42.720.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 18	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Jumlah dokumen laporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji	1 Dokumen	115.000.000	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Jumlah dokumen laporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji	1 Dokumen	115.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 19	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen laporan pemberian hibah dan bantuan sosial	4 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen laporan pemberian hibah dan bantuan sosial	4 Dokumen	150.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 20	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen laporan bantuan keuangan partai politik	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen laporan bantuan keuangan partai politik	1 Dokumen	50.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 21	Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah dokumen laporan realisasi dana transfer	4 Dokumen	150.000.000	Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah dokumen laporan realisasi dana transfer	4 Dokumen	150.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 22	Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	Jumlah dokumen laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS	2 Dokumen	50.000.000	Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	Jumlah dokumen laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS	2 Dokumen	50.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	1 Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	268.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	1 Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	268.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 24	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung	1 Renperwal Penjabaran Pertanggung	200.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung	1 Renperwal Penjabaran Pertanggung	200.000.000

	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	jawaban Pelaksanaan APBD		Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018	jawaban Pelaksanaan APBD	
4.04 . 4.04.06 . 15 . 28	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD Tahun Anggaran 2018	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD Tahun Anggaran 2018	1 Dokumen	200.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 25	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal Tahun Anggaran 2019	1 Ranperwal Tentang Saldo Awal	17.000.000	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal Tahun Anggaran 2019	1 Ranperwal Tentang Saldo Awal	17.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 30	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah PPK Perangkat Daerah, PPKD, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan yang menjadi peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrua	92 Orang	15.000.000	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah PPK Perangkat Daerah, PPKD, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan yang menjadi peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrua	92 Orang	15.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 26	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya TA 2019	4 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya TA 2019	4 Dokumen	100.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 29	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jasa konsultasi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Paket	150.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jasa konsultasi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Paket	150.000.000

4.04 . 4.04.06 . 15 . 31	Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Ranperwal Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	50.000.000	Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Ranperwal Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	50.000.000
4.04 . 4.04.06 . 15 . 32	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Jumlah sidang pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	6 Kali	150.000.000	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Jumlah sidang pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	6 Kali	150.000.000
4.04 . 4.04.06 . 18	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100	1.100.000.000	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100	1.100.000.000
4.04 . 4.04.06 . 18 . 02	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah(DKBMD),Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah(DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah	3 Dokumen	60.450.000	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah(DKBMD),Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah(DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah	3 Dokumen	60.450.000
4.04 . 4.04.06 . 18 . 03	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang yang menjadi peserta pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah	110 Orang	269.700.000	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang yang menjadi peserta pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah	110 Orang	269.700.000

4.04 . 4.04.06 . 18 . 04	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah	2 Dokumen	180.150.000	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah	2 Dokumen	180.150.000
4.04 . 4.04.06 . 18 . 05	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Jumlah dokumen pencatatan aset / barang milik daerah	6 Dok KIB (A, B,C, D, E dan F)	160.000.000	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Jumlah dokumen pencatatan aset / barang milik daerah	6 Dok KIB (A, B,C, D, E dan F)	160.000.000
4.04 . 4.04.06 . 18 . 01	Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)	Jumlah paket profil tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya berbasis teknologi informasi	1 Paket	50.000.000	Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)	Jumlah paket profil tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya berbasis teknologi informasi	1 Paket	50.000.000
4.04 . 4.04.06 . 18 . 06	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	30 Sertifikat	179.700.000	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	30 Sertifikat	179.700.000
4.04 . 4.04.06 . 18 . 07	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	1 Sertifikat	125.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	1 Sertifikat	125.000.000
4.04 . 4.04.06 . 18 . 08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah papan nama aset milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	52 Papan Nama Aset	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah papan nama aset milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	52 Papan Nama Aset	75.000.000
4.01 . 4.04.06 . 44	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian IKM Perangkat Daerah	85	10.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian IKM Perangkat Daerah	85	10.000.000
4.01 . 4.04.06 . 44 . 06	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey	1 Dokumen	5.000.000	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey	1 Dokumen	5.000.000
4.01 . 4.04.06 . 44 . 336	Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	20 SOP	5.000.000	Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	20 SOP	5.000.000

BAB III**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Bahwa pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Keuangan adalah "Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif"

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipatif.

Partisipatif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan.

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien

Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel.

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif.

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut misi yang diemban adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah.**2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah.****3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan.**

4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Daerah.

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi BPKAD Kota Tasikmalaya untuk :

1. Mendorong terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien.
2. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mendukung untuk mewujudkan Visi “KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”. Visi tersebut mengandung makna :

Religius : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Madani : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab untuk mendukung Misi ke 5 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Selanjutnya BPKAD, dalam mewujudkan pencapaian Misi ke 5 tersebut mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Tasikmalaya adalah :

Tujuan ke delapan dari misi ke lima yaitu terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :

1. Sasaran ke lima belas meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi, dan strategi meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui program tasik layanan prima, serta arah kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.
2. Sasaran ke enam belas yaitu meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah, dan strategi meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan program peningkatan kinerja keuangan dan aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja, serta arah kebijakan peningkatan sistem perencanaan pembangunan

daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional dan akuntabel, peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD beserta indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2017-2022 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tahun 2017-2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN					TARGET AKHIR RENSTRA
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	78,91	82	85	89	90	91	91
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah		Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,53	75	77	79	81	82	82

			Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	2	3	3	3	4	4
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya akan menjalankan 9 program dan 75 kegiatan yaitu sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
- 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 13 Penyediaan Makanan dan Minuman
- 14 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
- 15 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- 3 Pengadaan Meubelair
- 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
- 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- 7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- 8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
- 9 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 10 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
- 11 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
 - 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
 - 3 Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah
 - 4 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
- 6 Program Perencanaan Kerja**
 - 1 Penyusunan Rencana Kerja
 - 2 Penyusunan Perubahan Rencana Strategis
 - 3 Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
- 7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - 1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - 2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
 - 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
 - 4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - 5 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 6 Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD
 - 7 Verifikasi Dokumen Anggaran
 - 8 Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah
 - 9 Pengelolaan Data Anggaran
 - 10 Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 11 Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi
 - 12 Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 13 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 14 Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 15 Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah
 - 16 Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya
 - 17 Pelaporan Pajak Orang Pribadi
 - 18 Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji
 - 19 Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
 - 20 Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik
 - 21 Penatausahaan Dana Transfer
 - 22 Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS

- 23 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 24 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- 25 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal
- 26 Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD
- 27 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD
- 28 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua
- 30 Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

8 Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah

- 1 Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)
- 2 Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3 Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 4 Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 5 Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah
- 6 Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah
- 7 Penilaian Barang Milik Daerah
- 8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah

9 Program Peningkatan Pelayanan Publik

- 1 Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik
- 2 Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif. Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kota Tasikmalaya

Kode Ring	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020						Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
					APBD Kota	APBD Provinsi	APBN	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)			
4	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang				9.652.711.000	100.000.000	-	9.752.711.000			9.977.628.000			
4	Keuangan				9.652.711.000	100.000.000	-	9.752.711.000			9.977.628.000			
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.068.683.000	-	-	2.068.683.000			2.179.600.000			
4	04	4.04.06	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek	BPKAD	800 Buah 12 Buku	3.600.000	-	-	3.600.000	800 Buah 12 Buku	3.600.000
4	04	4.04.06	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet	BPKAD	12 Bulan	804.000.000	-	-	804.000.000	12 Bulan	850.000.000
4	04	4.04.06	01	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan / bangunan kantor yang diasuransikan	BPKAD	9 Unit	95.100.000	-	-	95.100.000	9 Unit	98.000.000
4	04	4.04.06	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	BPKAD	31 Unit	35.950.000	-	-	35.950.000	31 Unit	36.000.000
4	04	4.04.06	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan	BPKAD	12 Bulan	230.585.000	-	-	230.585.000	12 Bulan	250.000.000
4	04	4.04.06	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	BPKAD	19 Jenis	90.000.000	-	-	90.000.000	19 Jenis	92.000.000
4	04	4.04.06	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan Jumlah penjilidan	BPKAD	14 Jenis 17.020 Lembar 55 Buku	100.000.000	-	-	100.000.000	14 Jenis 17.020 Lembar 55 Buku	100.000.000

4	04	4.04.06	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	BPKAD	13 Buah	15.000.000	-	-	15.000.000	13 Buah	15.000.000
4	04	4.04.06	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	18 Buah	88.000.000	-	-	88.000.000	18 Buah	90.000.000
4	04	4.04.06	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	BPKAD	20 Unit	48.000.000	-	-	48.000.000	20 Unit	50.000.000
4	04	4.04.06	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	BPKAD	360 Eksemplar	24.000.000	-	-	24.000.000	360 Eksemplar	30.000.000
						Jumlah iklan media massa		10 Kali				10 Kali		
4	04	4.04.06	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu	BPKAD	4020 Dus	118.948.000	-	-	118.948.000	4020 Dus	120.000.000
						Jumlah makan dan minum harian	BPKAD	14 Jenis				14 Jenis		
4	04	4.04.06	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	BPKAD	136 Kali	251.000.000	-	-	251.000.000	136 Kali	275.000.000
4	04	4.04.06	01	21	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	BPKAD	12 Orang	156.000.000	-	-	156.000.000	12 Orang	160.000.000
4	04	4.04.06	01	22	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai	BPKAD	20 Paket	8.500.000	-	-	8.500.000	20 Paket	10.000.000
4	04	4.04.06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.500.820.000	-	-	1.500.820.000		1.579.820.000
4	04	4.04.06	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	BPKAD	1 Unit	100.000.000	-	-	100.000.000	1 Unit	100.000.000
4	04	4.04.06	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	BPKAD	1 Unit	50.000.000	-	-	50.000.000	1 Unit	50.000.000
4	04	4.04.06	02	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor	BPKAD	3 Unit	50.000.000	-	-	50.000.000	3 Unit	100.000.000
4	04	4.04.06	02	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	BPKAD	1 Paket	348.000.000	-	-	348.000.000	1 Paket	200.000.000
4	04	4.04.06	02	23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan	BPKAD	6 Kali	151.875.000	-	-	151.875.000	6 Kali	151.875.000

4	04	4.04.06	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	BPKAD	13 Kali	122.945.000	-	-	122.945.000	13 Kali	122.945.000
4	04	4.04.06	02	26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	BPKAD	3 Kali	123.600.000	-	-	123.600.000	3 Kali	130.000.000
4	04	4.04.06	02	29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala meubelair	BPKAD	5 Kali	25.000.000	-	-	25.000.000	5 Kali	30.000.000
4	04	4.04.06	02	30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	30 Kali	80.400.000	-	-	80.400.000	30 Kali	90.000.000
4	04	4.04.06	02	45	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah jasa prasarana aparatur	BPKAD	2 Paket	49.000.000	-	-	49.000.000	2 Paket	55.000.000
4	04	4.04.06	02	48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	BPKAD	15 Unit	400.000.000	-	-	400.000.000	15 Unit	550.000.000
4	04	4.04.06	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur				45.000.000	-	-	45.000.000		45.000.000
4	04	4.04.06	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	BPKAD	150 Potong	45.000.000	-	-	45.000.000	150 Potong	45.000.000
4	04	4.04.06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				22.000.000	-	-	22.000.000		22.000.000
4	04	4.04.06	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta	BPKAD	10 Orang	22.000.000	-	-	22.000.000	10 Orang	22.000.000
4	04	4.04.06	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				70.000.000	-	-	70.000.000		75.000.000
4	04	4.04.06	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	BPKAD	1 Dok	10.000.000	-	-	10.000.000	1 Dok	10.000.000
4	04	4.04.06	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	BPKAD	2 Dok	30.000.000	-	-	30.000.000	2 Dok	30.000.000

4	04	4.04.06	06	03	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	BPKAD	2 Dok	20.000.000	-	-	20.000.000		2 Dok	25.000.000
4	04	4.04.06	06	04	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	BPKAD	1 Dok	10.000.000	-	-	10.000.000		1 Dok	10.000.000
4	04	4.04.06	13		Program Perencanaan Kerja				50.000.000	-	-	50.000.000			50.000.000
4	04	4.04.06	13	01	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	BPKAD	1 Dok	10.000.000	-	-	10.000.000		1 Dok	10.000.000
4	04	4.04.06	13	03	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun	BPKAD	1 Dok	10.000.000	-	-	10.000.000		1 Dok	10.000.000
4	04	4.04.06	13	04	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan triwulanan	BPKAD	4 Dok	30.000.000	-	-	30.000.000		4 Dok	30.000.000
4	04	4.04.06	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				4.190.000.000	100.000.000	-	4.290.000.000			4.510.000.000
4	04	4.04.06	15	01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKAD	1 Ranperda APBD	215.840.000	-	-	215.840.000		1 Ranperda APBD	226.632.000
4	04	4.04.06	15	02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKAD	1 Ranperwal Penjabaran APBD	122.060.000	-	-	122.060.000		1 Ranperwal Penjabaran APBD	128.163.000
4	04	4.04.06	15	03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKAD	1 Ranperda Perubahan APBD	215.840.000	-	-	215.840.000		1 Ranperda Perubahan APBD	226.632.000
4	04	4.04.06	15	04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKAD	1 Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD	122.060.000	-	-	122.060.000		1 Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD	128.163.000
4	04	4.04.06	15	05	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD	BPKAD	1 Ranperwal Pedoman Penyusunan APBD	100.660.000	-	-	100.660.000		1 Ranperwal Pedoman Penyusunan APBD	105.693.000

4	04	4.04.06	15	06	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	BPKAD	1 Ranperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	141.590.000	-	-	141.590.000	1 Ranperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	148.669.500
4	04	4.04.06	15	07	Verifikasi Dokumen Anggaran	Jumlah dokumen anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya	BPKAD	1.000 RKA/RKPA	93.960.000	-	-	93.960.000	1.000 RKA/RKPA	98.658.000
4	04	4.04.06	15	08	Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi target anggaran pendapatan daerah	BPKAD	4 Dok	85.910.000	-	-	85.910.000	4 Dok	90.205.500
4	04	4.04.06	15	09	Pengelolaan Data Anggaran	Jumlah dokumen data anggaran	BPKAD	1 Dok	85.120.000	-	-	85.120.000	1 Dok	89.376.000
4	04	4.04.06	15	10	Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	1 Dok	-	100.000.000	-	100.000.000	1 Dok	105.000.000
4	04	4.04.06	15	11	Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan bantuan keuangan provinsi	BPKAD	1 Dok	116.960.000	-	-	116.960.000	1 Dok	122.808.000
4	04	4.04.06	15	12	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen SPD dan dokumen SP2D	BPKAD	14.000 SPD dan 16.000 SP2D	260.000.000	-	-	260.000.000	14.000 SPD dan 16.000 SP2D	260.000.000
4	04	4.04.06	15	13	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan daerah	BPKAD	41 Orang Bendahara Pengeluaran dan 14 Orang Bendahara Penerimaan	230.000.000	-	-	230.000.000	41 Orang Bendahara Pengeluaran dan 14 Orang Bendahara Penerimaan	230.000.000
4	04	4.04.06	15	14	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah dokumen kendali pelaksanaan realisasi APBD	BPKAD	4 Dok	40.000.000	-	-	40.000.000	4 Dok	40.000.000
4	04	4.04.06	15	15	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rekapitulasi transaksi harian dari BUD	BPKAD	4 Dok	30.000.000	-	-	30.000.000	4 Dok	30.000.000
4	04	4.04.06	15	16	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah leger gaji pegawai pada sistem penggajian	BPKAD	102 Dus	150.000.000	-	-	150.000.000	102 Dus	150.000.000

4	04	4.04.06	15	17	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT pelaporan pajak orang pribadi	BPKAD	7.500 SPT	45.000.000	-	-	45.000.000	7.500 SPT	45.000.000
4	04	4.04.06	15	18	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Jumlah dokumen laporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji	BPKAD	1 Dok	120.000.000	-	-	120.000.000	1 Dok	120.000.000
4	04	4.04.06	15	19	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen laporan pemberian hibah dan bantuan sosial	BPKAD	4 Dok	200.000.000	-	-	200.000.000	4 Dok	200.000.000
4	04	4.04.06	15	20	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen laporan bantuan keuangan partai politik	BPKAD	1 Dok	50.000.000	-	-	50.000.000	1 Dok	50.000.000
4	04	4.04.06	15	21	Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah dokumen laporan realisasi dana transfer	BPKAD	4 Dok	160.000.000	-	-	160.000.000	4 Dok	160.000.000
4	04	4.04.06	15	22	Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	Jumlah dokumen laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS	BPKAD	2 Dok	55.000.000	-	-	55.000.000	2 Dok	55.000.000
4	04	4.04.06	15	23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	300.000.000	-	-	300.000.000	1 Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	330.000.000
4	04	4.04.06	15	24	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD	1 Ranperwal Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	150.000.000	-	-	150.000.000	1 Ranperwal Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	165.000.000
4	04	4.04.06	15	25	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Saldo Awal	BPKAD	1 Ranperwal Tentang Saldo Awal	150.000.000	-	-	150.000.000	1 Ranperwal Tentang Saldo Awal	165.000.000
4	04	4.04.06	15	26	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya	BPKAD	2 Dok	150.000.000	-	-	150.000.000	2 Dok	165.000.000
4	04	4.04.06	15	28	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD	BPKAD	1 Dok	300.000.000	-	-	300.000.000	1 Dok	330.000.000

4	04	4.04.06	15	29	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jasa konsultansi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	BPKAD	1 Paket	150.000.000	-	-	150.000.000		1 Paket	165.000.000
4	04	4.04.06	15	30	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah PPK Perangkat Daerah, PPKD, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan yang menjadi peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual	BPKAD	92 Orang	200.000.000	-	-	200.000.000		92 Orang	220.000.000
4	04	4.04.06	15	32	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Jumlah sidang pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	BPKAD	6 Kali	150.000.000	-	-	150.000.000		6 Kali	160.000.000
4	01				Administrasi Pemerintahan										
4	01	4.04.06	44		Program Peningkatan Pelayanan Publik				10.000.000	-	-	10.000.000			20.000.000
4	01	4.04.06	44	06	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey	BPKAD	1 Dok	5.000.000	-	-	5.000.000		1 Dok	10.000.000
4	01	4.04.06	44	336	Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah	Jumlah dokumen SOP yang disusun	BPKAD	20 SOP	5.000.000	-	-	5.000.000		20 SOP	10.000.000
4	04				Keuangan										
4	04	4.04.06	18		Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah				1.696.208.000	-	-	1.696.208.000			1.496.208.000
4	04	4.04.06	18	01	Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)	Jumlah paket profil tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya berbasis teknologi informasi	BPKAD	1 Paket	150.000.000	-	-	150.000.000		1 Paket	150.000.000
4	04	4.04.06	18	02	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah DKBM, DKPBMD dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah	BPKAD	3 Dok	46.208.000	-	-	46.208.000		3 Dok	46.208.000

4	04	4.04.06	18	03	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang yang menjadi peserta pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah	BPKAD	110 Orang	350.000.000	-	-	350.000.000		110 Orang	350.000.000
4	04	4.04.06	18	04	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah	BPKAD	2 Dok	165.000.000	-	-	165.000.000		2 Dok	165.000.000
4	04	4.04.06	18	05	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Jumlah dokumen pencatatan aset / barang milik daerah	BPKAD	6 Dok KIB (A, B, C, D, E dan F)	600.000.000	-	-	600.000.000		6 Dok KIB (A, B, C, D, E dan F)	350.000.000
4	04	4.04.06	18	06	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	BPKAD	30 Sertifikat	250.000.000	-	-	250.000.000		30 Sertifikat	300.000.000
4	04	4.04.06	18	07	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	BPKAD	1 Dok	135.000.000	-	-	135.000.000		1 Dok	135.000.000
					JUMLAH PROGRAM	9									
					JUMLAH KEGIATAN	75									
					JUMLAH ANGGARAN				9.652.711.000	100.000.000	-	9.752.711.000			9.977.628.000

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renja - BPKAD) Kota Tasikmalaya Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Renstra - BPKAD) Tahun 2017 - 2022 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Tasikmalaya serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2020.

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dengan tersusunnya rencana kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

TTD

**HANAFI, SH., MH
NIP. 19680705 199203 1 011**